
FENOMENA KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK PADA INSTANSI DI INDONESIA

Yonatan Adam¹, Denok Kurniasih², Tobirin³,

^{1,2,3} Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: yonatan.adam@mhs.unsoed.ac.id, tobirin@unsoed.ac.id,

denok.kurniasih@unsoed.ac.id

Abstrak

Fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik merupakan aspek yang melibatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan, Administrasi, Publik

Abstract

The phenomenon of policy from the perspective of public administration ethics is an aspect involving integrity, transparency, and accountability in governance. Public policies have significant impacts on various layers of society and sectors of national life. In this context, the application of ethical principles is crucial to ensure that every policy produced reflects public interests, is based on moral norms, and sustains resources. This research aims to delve deeper into the dynamics of implementing public administration ethics in policy decision-making in Indonesia, focusing on relevant institutions. The research method used is a literature review. The results indicate that the implementation of the policy phenomenon from the perspective of public administration ethics in Indonesia has a significant impact on maintaining the integrity, transparency, and accountability of the government. Ethical principles such as public interest and justice must be steadfastly upheld in every aspect of policy. Public administration ethics also serve as a defense against corruption, with openness, accountability, and integrity as key pillars. Involving all stakeholders and the public in the decision-making process, along with the implementation of effective oversight mechanisms, is a crucial step in creating a moral, fair, and sustainable government.

Keywords: Policy, Administration, Public

PENDAHULUAN

Masuknya era reformasi menimbulkan tantangan bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan menghadapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis ini, yang berasal dari struktur birokrasi selama periode orde baru, bahkan memicu protes di tingkat nasional dan lokal. Dampak dari

perilaku birokrat yang tidak mendukung pelayanan publik mengakibatkan tujuan awal birokrasi dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme, menurunkan integritas dan kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah seharusnya bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Survei menunjukkan bahwa indeks integritas layanan publik Indonesia berada di peringkat 70 dari 109 negara, bahkan di bawah beberapa negara tetangga seperti Timor Leste, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Hasil survei tersebut menyoroti kelemahan terutama pada aspek administrasi publik, yang menduduki peringkat 97 dalam komponen layanan administrasi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan, terutama pada aspek administrasi publik, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik secara keseluruhan.

Keberhasilan reformasi telah diperlihatkan oleh berbagai negara, termasuk baik negara maju maupun negara berkembang pada masa lalu. Di Cina, sebagai contoh, restrukturisasi organisasi pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi fungsi birokrasi. Melalui reformasi administratif, Cina berhasil mengubah organisasi pelayanan publik dengan merevitalisasi fungsinya, memperkuat fungsi makroperencanaan, dan meningkatkan manajemennya. Sebagai tambahan, Amerika Serikat beberapa abad yang lalu telah menyadari pentingnya melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi negaranya. Menghadapi dampak revolusi industri pada masa itu, para birokrat menyadari bahwa masalah masyarakat dapat timbul, terutama terkait dengan banyaknya imigran yang datang untuk bekerja. Oleh karena itu, para birokrat mengambil tindakan dengan membuat kebijakan publik yang lebih terarah dan pro-masyarakat Indonesia seharusnya dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Amerika Serikat, di mana perilaku birokrat sangat adaptif dan berorientasi pada kebijakan publik yang mendukung kepentingan masyarakat (Haning, 2018).

Pemberian layanan kepada masyarakat telah menjadi fokus utama dalam pelaksanaan administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi permasalahan kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan dalam pelayanan publik di negara ini cenderung stagnan. Dampaknya sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya. Dalam konteks ekonomi, buruknya pelayanan publik dapat menyebabkan penurunan investasi, berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di industri-industri, dan ketidakmungkinan pembukaan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pengangguran (Mahsyar, 2011).

Organisasi pelayanan publik yang baik adalah organisasi yang mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu kemudahan prosedur layanan menjadi kunci penting keberhasilan organisasi pelayanan publik (Kurniasih & Saputra, 2017). Administrasi publik merupakan disiplin ilmu dan praktik yang terkait dengan organisasi dan manajemen kegiatan pemerintahan. Secara umum, cakupan administrasi publik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan layanan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Tujuan utama dari administrasi publik adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan yang disediakan oleh pemerintah. Kompleksitas administrasi publik melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan strategis, alokasi sumber daya, manajemen kepegawaian, hingga interaksi dengan masyarakat. Selain itu, administrasi publik menekankan prinsip-prinsip penting seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka, sementara transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat mengharuskan administrasi publik untuk secara aktif merespons perubahan dan aspirasi yang berkembang.

Dengan demikian, administrasi publik memainkan peran krusial dalam menjaga fungsi dan keseimbangan pemerintahan. Melalui pendekatan yang holistik, administrasi publik berperan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, memastikan layanan yang berkualitas, dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai bidang yang dinamis, administrasi publik terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman, mengintegrasikan teknologi baru, dan menciptakan model pemerintahan yang lebih responsif dan efisien (Kadarisman, 2020).

Tantangan umum yang kerap dihadapi dalam administrasi publik adalah kompleksitas beragam permasalahan yang dapat muncul seiring waktu. Administrasi publik bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan memberikan layanan kepada masyarakat, namun seringkali dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks, seperti meningkatnya harapan masyarakat, perubahan kebijakan, dan dinamika ekonomi. Masalah internal, seperti birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat, juga menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang inovatif dan adaptif untuk mengatasi permasalahan ini serta meningkatkan kinerja administrasi publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih responsive (Firda, 2013).

Pentingnya etika dalam pelaksanaan administrasi publik menuntut penetapan norma dan regulasi yang mengarahkan perilaku para aparatur. Organisasi publik, sebagai entitas yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memegang peran sentral dalam dinamika pelayanan publik. Oleh karena itu, integritas dan moralitas para administrator publik menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung *good governance*.

Masyarakat menginginkan agar pemerintah lebih *responsive* atau cepat tanggap terhadap permintaan masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. *E-government* diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik. Penerapan *E-government* di Indonesia diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Kurniasih, 2023).

Para administrator publik diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika positif. Ketika mereka mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika administrasi publik, maka pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara efektif. Selain itu, hal ini berpotensi membentuk karakter individu yang didukung oleh sifat disiplin, sopan, santun, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi.

Penerapan etika administrasi publik tidak hanya menjadi landasan moral semata, melainkan juga memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan administrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Keberhasilan implementasi etika administrasi publik dapat menjadi pilar penting dalam membangun tatanan administrasi publik yang responsif, adil, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pembentukan karakter etis para aparatur adalah langkah strategis untuk mendukung perwujudan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait .

METODE PENELITIAN

Metode *literature review* merupakan pendekatan penelitian yang difokuskan pada tinjauan dan analisis kajian literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Dalam melakukan *literature review*, peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi sumber-sumber utama, penilaian kualitas metodologi penelitian, dan pengumpulan data-data yang relevan. Langkah pertama dalam metode *literature review* adalah merumuskan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang jelas. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan basis data, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lainnya untuk mengidentifikasi literatur yang sesuai. Setelah itu, sumber-sumber yang ditemukan diorganisir, dan data yang relevan diekstrak untuk memahami temuan-temuan utama dalam bidang penelitian tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan pengetahuan di bidang tertentu, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang telah ada, dan menyusun dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut. *Literature review* juga memainkan peran penting dalam merancang kerangka konseptual suatu penelitian dan membentuk landasan teoritis yang kuat. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan pandangan yang komprehensif dan mendalam terhadap topik penelitian tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Fenomena Kebijakan dalam Perspektif Etika Administrasi Publik di Instansi-Instansi di Indonesia

Penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Di tengah tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan efisien, instansi pemerintah di Indonesia diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika yang tinggi. Prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah seharusnya mencerminkan kepentingan publik. Dalam konteks ini, penting bagi para penyelenggara pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga secara adil memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Prinsip keadilan harus menjadi panduan utama dalam setiap aspek kebijakan yang diambil. Lebih lanjut, etika administrasi publik juga memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan. Penerapan kebijakan yang berkelanjutan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil saat ini tidak merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Landasan etika administrasi publik juga menjadi benteng dalam mengurangi risiko terjadinya praktik-praktik korupsi. Keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas harus dijunjung tinggi dalam setiap langkah pemerintahan. Etika administrasi publik tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, pelibatan semua pemangku kepentingan, penerapan mekanisme pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas menjadi langkah-langkah yang tak dapat diabaikan. Dengan demikian, penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika

administrasi publik bukan hanya menjadi tugas instansi pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan di Indonesia.

Penerapan etika administrasi publik di Indonesia menjangkau lebih dari sekadar tanggung jawab internal instansi pemerintah. Sebaliknya, pendekatan ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dengan menggali bersama partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya secara langsung melibatkan warga negara dalam membentuk kebijakan, meyakinkan bahwa setiap keputusan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Upaya pemberdayaan ini melebihi aspek moral semata, menjadi sebuah komitmen konkret untuk menciptakan lingkungan administrasi yang tidak hanya bersih, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan bukan hanya strategi partisipatif, melainkan juga merupakan langkah esensial untuk mengokohkan fondasi kebijakan yang lebih demokratis. Pemerintah, dengan berfokus pada keterlibatan masyarakat, berharap menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung kepentingan umum, tetapi juga memperhitungkan keanekaragaman kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Lebih dari sekadar sebuah inisiatif, upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan untuk saat ini, tetapi juga mampu merespons perubahan dan tantangan di masa depan.

Upaya pemberdayaan ini juga menjadi strategi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan membuka pintu partisipasi, pemerintah menunjukkan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritasnya dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan warga negara. Komitmen terhadap lingkungan administrasi yang bersih dan transparan juga menjadi dasar untuk membangun kepercayaan yang kokoh. Oleh karena itu, penerapan etika administrasi publik melalui pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebagai tujuan akhir, melainkan juga sebagai strategi yang membawa dampak positif jangka panjang bagi kemajuan bangsa dan negara.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Budiawan et al., 2021) Analisis fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik pada instansi di Indonesia dilakukan melalui metode eksplanatif dengan fokus pada etika birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar fenomena, dengan penekanan pada etika sebagai penentu pelaksanaan tugas dan fungsi aparat birokrasi. Penerapan etika administrasi pemerintahan memerlukan peraturan yang mengatur perilaku birokrat agar konsisten dalam menjalankan etika yang baik. Konsep *Reinventing Government* menjadi upaya sadar untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, serta sikap perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bukan hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya birokrasi untuk berkolaborasi dengan aktor non-negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi *Reinventing Government* diimplementasikan melalui pendekatan integral, menggabungkan aspek struktural dan kultural. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi dengan baik. Hal ini tergantung pada kemauan individu di dalam instansi untuk mengubah kebiasaan buruk dan menggantinya dengan penerapan etika administrasi yang positif.

Meskipun fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia menunjukkan upaya penting untuk menjaga integritas dan transparansi pemerintahan, terdapat beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi. Pertama, implementasi etika administrasi publik seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip etika di kalangan aparat birokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapan nilai-nilai etika, sehingga risiko terjadinya perilaku tidak etis tetap tinggi.

Kedua, adanya celah atau ambiguitas dalam peraturan atau pedoman terkait etika administrasi publik dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam. Ini dapat menciptakan situasi di mana norma-norma etika dapat diabaikan atau diartikan secara subyektif, mengakibatkan ketidakjelasan dalam penilaian dan penegakan etika di tingkat instansi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menguatkan kerangka regulasi yang mengikat dan memberikan pedoman yang jelas bagi para penyelenggara pemerintahan.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan belum selalu mampu mencapai keadilan sosial dan pemerataan manfaat secara merata. Beberapa kebijakan dapat lebih menguntungkan kelompok tertentu, meninggalkan sebagian masyarakat yang rentan atau kurang berdaya. Penerapan prinsip keadilan sebagai bagian dari etika administrasi publik perlu lebih diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mampu memberikan dampak positif secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih belum optimal. Meskipun partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai elemen kunci dalam etika administrasi publik, praktiknya seringkali terbatas. Ini dapat mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat dialog antara pemerintah dan warga perlu diperkuat guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan pluralitas pandangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan. Meskipun telah ada upaya reformasi birokrasi, tantangan tetap ada, dan penerapan etika administrasi memerlukan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, A., Sunarti, N., & Galuh, U. (2021). Analisis etika pejabat birokrasi Indonesia. *Jurnal MODERAT*, 7(November), 725–745.
- Firda, F. (2013). Administrative Responsibility Studi Deskriptif tentang Perilaku Kerja Pegawai pada Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrative Responsibility di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 36–46.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi

- Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 25–37.
- Kadarisman, M. (2020). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 125.
- Kurniasih, D. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Teknologi Digitalisasi Di Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4), 373 – 383. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>
- Kurniasih, D., & Saputra, A. S. (2017). *Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara – ASIAN* ISSN : 2338-9567 *Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara – ASIAN* ISSN : 2338-9567. 5, 47–62.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Otoritas*, 1(2), 81–90.
- Sururi, A. (2017). No Title. *Jurnal Spirit Publik*, 12(2), 14–31.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

REVIEW JURNAL

Title	FENOMENA KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK PADA INSTANSI DI INDONESIA
Journal	CO-VALUE
Page	1-7
Year	2023
Date	9 Desember 2023
Reviewer	Sutono
Abstract	Fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia merupakan aspek penting yang melibatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan negara. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip etika menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik, berlandaskan norma-norma moral, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam

	<p>dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait . metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-Prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan.</p> <p>Kata kunci: Kebijakan, Administrasi, Publik</p>
<p>Introduction</p>	<p>Masuknya era reformasi menimbulkan tantangan bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan menghadapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis ini, yang berasal dari struktur birokrasi selama periode orde baru, bahkan memicu protes di tingkat nasional dan lokal. Dampak dari perilaku birokrat yang tidak mendukung pelayanan publik mengakibatkan tujuan awal birokrasi dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme, menurunkan integritas dan kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah seharusnya bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Survei menunjukkan bahwa indeks integritas layanan publik Indonesia berada di peringkat 70 dari 109 negara, bahkan di bawah beberapa negara tetangga seperti Timor Leste, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Hasil survei tersebut menyoroti kelemahan terutama pada aspek administrasi publik, yang menduduki peringkat 97 dalam komponen layanan administrasi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan, terutama pada aspek administrasi publik, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik secara keseluruhan.</p>
<p>Method</p>	<p>Metode literature review merupakan pendekatan penelitian yang difokuskan pada tinjauan dan analisis kajian literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Dalam melakukan literature review, peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis hasil-hasil</p>

	<p>penelitian, artikel ilmiah, buku, dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi sumber-sumber utama, penilaian kualitas metodologi penelitian, dan pengumpulan data-data yang relevan. Langkah pertama dalam metode literature review adalah merumuskan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang jelas. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan basis data, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lainnya untuk mengidentifikasi literatur yang sesuai. Setelah itu, sumber-sumber yang ditemukan diorganisir, dan data yang relevan diekstrak untuk memahami temuan-temuan utama dalam bidang penelitian tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan pengetahuan di bidang tertentu, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang telah ada, dan menyusun dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut. Literature review juga memainkan peran penting dalam merancang kerangka konseptual suatu penelitian dan membentuk landasan teoritis yang kuat. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan pandangan yang komprehensif dan mendalam terhadap topik penelitian tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer.</p>
<p>Discussion</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. 2. Landasan etika administrasi publik juga menjadi benteng dalam mengurangi risiko terjadinya praktik-praktik korupsi 3. Penerapan etika administrasi publik di Indonesia menjangkau lebih dari sekadar tanggung jawab internal instansi pemerintah. <p>Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan bukan hanya strategi partisipatif, melainkan juga merupakan langkah esensial untuk mengokohkan fondasi kebijakan yang lebih demokratis</p>
<p>Conclusion</p>	<p>Penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan. Meskipun</p>

	telah ada upaya reformasi birokrasi, tantangan tetap ada, dan penerapan etika administrasi memerlukan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan positif.
Excess	Judul penelitian dan metode penelitian yang digunakan sudah sesuai dengandan tepat.
Lack	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada pembaharuan penelitian2. Naskah penulisan masih belum sesuai dengan templat